

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR  
TAHUN 2016 - 2021**



**RUANG TERBUKA HIJAU  
WLINGI - BLITAR**

**TAMAN IDAMAN HATI**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayah –Nya semata penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) tahun 2016 - 2021 Kecamatan Wlingi dapat diselesaikan pada waktunya.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ( P-RENSTRA ) ini sangatlah penting artinya bagi OPD Kecamatan Wlingi karena selain sebagai bahan pegangan dalam menjalankan tugas baik yang bersifat rutin maupun program-program lain yang akan dilaksanakan. Juga sebagai acuan atas pelaksanaan tugas yang sedang dilaksanakan maupun pelaksanaan tugas-tugas kedepan guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih baik dari tahun–tahun sebelumnya.

Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Perubahan Renstra ini masih jauh dari keesempurnaan, untuk itu kami menerima kritik atau saran yang bersifat membangun yang senantiasa kami harapkan guna kesempurnaan dalam penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Wlingi Tahun 2016 - 2021.

Akhirnya kami berharap agar Renstra Kecamatan Wlingi ini dapat berguna, baik untuk aparatur Pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Wlingi, 24 Mei 2017

Pit. CAMAT WLINGI

SUHENDRO WINARSO, S.STP, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19760525 199511 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika penulisan.....	4
BAB II Gambaran Pelayanan OPD.....	8
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.....	8
2.2 Sumberdaya Kecamatan Wlingi.....	22
2.3 Kinerja Pelayanan OPD.....	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan OPD.....	31
BAB III Isu-Isu Strategis.....	37
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Pelayanan OPD.....	37
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	42
3.3 Telaahan RTRW dan KLHS.....	44
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.....	48
BAB IV Tujuan, sasaran, Stategi dan Kebijakan.....	51
4.1 Visi dan Misi Kepala daerah.....	51
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah OPD.....	53
4.3 Strategi dan Kebijakan OPD.....	54
BAB V Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	61
BAB VI Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	69
BAB VII Penutup.....	71

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Strategis Kecamatan Wlingi merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Kecamatan Wlingi bersama rencana strategis OPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar. Rencana Strategis Kecamatan Wlingi mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Wlingi.

Latar Belakang Rencana strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun waktu 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2016-2021.

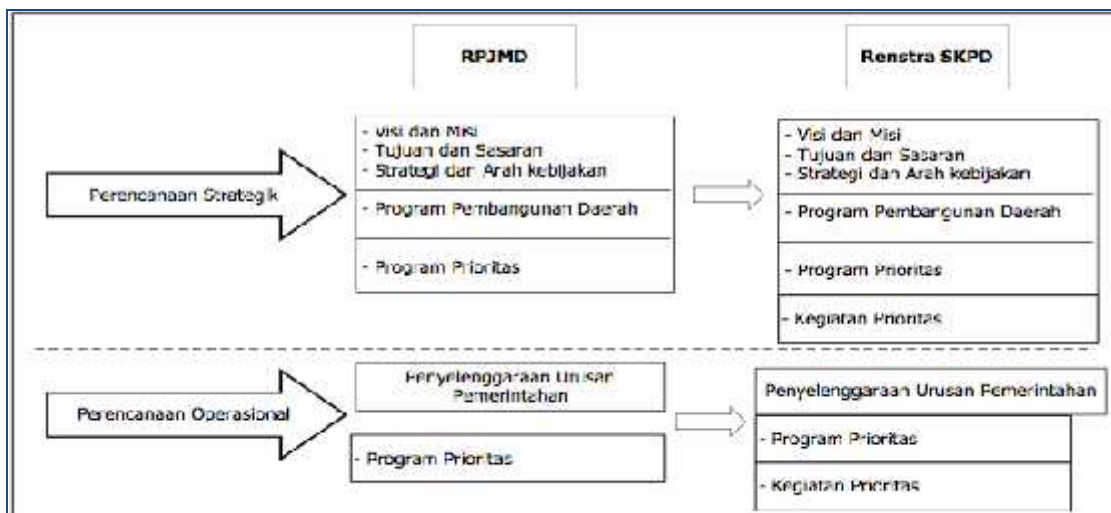
Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra OPD. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui :

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan - kegiatan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra OPD

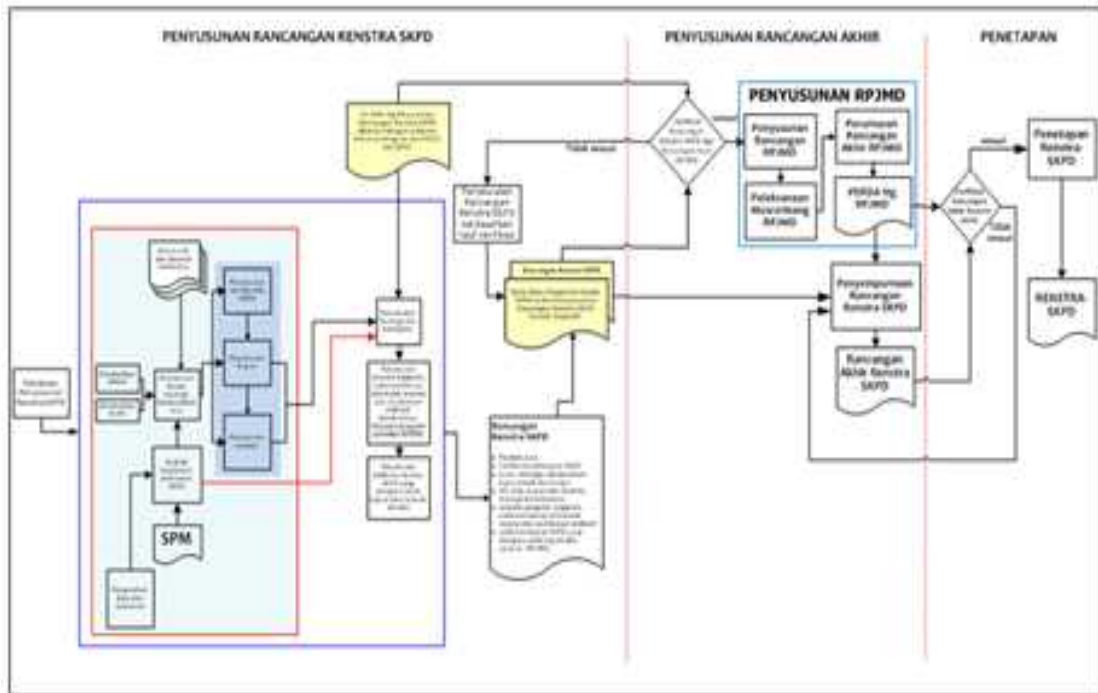
Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Wlingi selaku kepala OPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Blitar.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar 2016 - 2021 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016 - 2021 dan Renja OPD, ilustrasi keterhubungan Renstra OPD dengan RPJMD dan Renja OPD dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.1.1



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program - program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.



## 1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra OPD adalah :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Blitar 2011 – 2031
- Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Blitar 2016 – 2021;
- Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

- h. SK Camat Wlingi Nomor                      Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kecamatan Wlingi Tahun 2016 - 2021

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Wlingi Kabupaten Blitar.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Blitar dengan Kecamatan Wlingi, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban bagi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Blitar, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

### 1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Stratejik (Renstra) Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor     54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

##### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD,

keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja OPD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

### BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

#### 2.2 Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

#### 2.3 Kinerja OPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja OPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD kabupaten, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Faktor - faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan OPD

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini direview kembali factor-fakto dari dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari :

- Gambaran pelayanan OPD
- Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
- Sasaran Jangka Menengah dari Renstra OPD kabupaten
- Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD
- Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan hasil isu-isu tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun Rencana.

## BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR

### 4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan visi dan misi Kepala daerah yang dilaksanakan oleh OPD

### 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD sebagaimana (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah OPD) dan ( Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah OPD )

### 4.3 Strategi dan Kebijakan OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

## BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif ( Perumusan Rencana Program. Kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif)

## BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VII PENUTUP.

## LAMPIRAN

## BAB II

### GAMBARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur OPD Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

##### 2.1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat dibantu oleh perangkat Kecamatan yang terdiri dari Sekretariat Kecamatan, Seksi-seksi dan Kelurahan. Adapun susunan organisasi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar terdiri atas :

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi meliputi :
  1. Seksi Pemerintahan;
  2. Seksi Pelayanan Publik;
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  5. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Lurah.
- f. Sekretaris.
- g. Seksi meliputi :
  1. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
  2. Seksi Pelayanan Publik;
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;

##### 2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Camat; bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Tugas :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Kecamatan;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; dan
- Melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang ada di kecamatan.

Fungsi :

- Menyusun kebijakan teknis operasional kecamatan;
- Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- Menyelenggarakan pembinaan wilayah;
- Membina penyelenggaraan pemerinth desa dan kelurahan
- Melaksanakan pelayanan publik;
- Menusun laporan kinerja secara periodic kepada Bupati; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris Kecamatan; bertanggungjawab kepada camat

Tugas : Melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi penyesusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

Fungsi :

- Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

- Mengkoordinasikan Penyusunan penetapan Kinerja (PK);
- Memimpin pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- Mengkoordinasikan urusan kehumasan, keprotokolalan dan keputaan;
- Memverifikasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan/desa dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh kelurahan dan/ atau desa;
- Mengkoordinasikan inventarisasi asset/kekayaan daerah yang ada di kecamatan;
- Memimpin pelayanan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- Memverifikasi pengelolaan dan administrasi anggaran dan retribusi;
- Memverifikasi pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- Memverifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM);
- Mengkoordinasikan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP);
- Memfasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan
- Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- Mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- Mengevaluasi laporan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah daerah;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.

dan dalam melaksanakan tugas sekretaris kecamatan dibantu oleh 2 orang Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Tugas : Menyusun program, evaluasi, pelaporan dan keuangan.

Fungsi :

- Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Renja (Renja);
- Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

- Menyusun penetapan Kinerja (PK);
- Menyusun laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- Menyusun dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP);
- Menyusun pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan
- Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
- Merencanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- Menyusun penatausahaan keuangan;
- Menyusun surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- Menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan anggaran;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
- Menyusun administrasi dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai;
- Menyusun laporan penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lain pendapatan yang sah
- Menyusun laporan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site pemerintah daerah;
- Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

## 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas : Mengelola administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian urusan rumah tangga, perlengkapan kehumasan dan kepustakaan serta kersipan.

Fungsi :

- Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kersipan;
- Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- Melaksanakan urusan kehumasan, keprotokaolan dan kepustakaan;
- Melaksanakan pengaduan masyarakat
- Melaksanakan dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemerintahan

Tugas : menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Fungsi :

- mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- mengkoordinasikan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa;
- mengkoordinasikan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi serta penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan/atau desa;
- memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah/kepala desa dan perangkat kelurahan dan/atau desa;
- mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- mengkoordinasikan dan memfasilitasi bidang keagrariaan dan pendataan kependudukan;
- mengkoordinasikan dan mengevaluasi intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemerintahan;
- memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Forum Musyawarah Kelurahan atau sebutan lainnya;
- memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

- memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- memfasilitasi kerja sama antar kelurahan dan/atau desa dan kerja sama kelurahan dan/atau desa dengan pihak ketiga;
- memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas kelurahan dan/atau desa;
- mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

#### d. Seksi Pelayanan Publik

Tugas : penyelenggaraan sebagian urusan bidang pelayanan publik di Kecamatan.

Fungsi :

- menyusun dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- menyusun rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas di kecamatan;
- menyusun pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- mengkoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
- mengkoordinir dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
- memberikan pertimbangan teknis, legalisasi surat-surat yang dibutuhkan masyarakat;
- melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan publik;
- melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas : penyelenggaraan sebagian urusan bidang pemberdayaan masyarakat di Kecamatan

Fungsi :

- mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan/atau desa dan Kecamatan;
- memfasilitasi pengkoordinasikan keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan dan/atau desa;
- memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan desa;
- memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- memfasilitasi pendampingan desa di wilayahnya;
- memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertanian, kepariwisataan, perkoperasian, dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
- memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- merencanakan pengembangan perekonomian kelurahan/desa di wilayah kerjanya;

- memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;
- memfasilitasi kegiatan satuan tugas jabatan fungsional;
- melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemberdayaan masyarakat;
- mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tugas : penyelenggaraan sebagian urusan ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan.

Fungsi :

- mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan;
- memfasilitasi pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- memfasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban Kecamatan dan kelurahan dan/atau desa;
- menyelenggarakan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam serta pengungsi;
- melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Ketenteraman dan Ketertiban;
- mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

g. Seksi Kesejahteraan Sosial

Tugas : penyelenggaraan sebagian urusan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan.

Fungsi :

- mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
- melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat;
- memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kesejahteraan masyarakat;
- menyelenggarakan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat;
- melaksanakan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
- melaksanakan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
- memfasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- melaksanakan pengkoordinasian pemberian bantuan sosial, pembinaan olah raga dan kepemudaan serta peningkatan peranan perempuan;
- memfasilitasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- melaksanakan pendataan masalah kesejahteraan sosial;

- melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya

#### h. Lurah

Tugas : membantu Camat dalam

- melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- melakukan pemberdayaan masyarakat;
- melaksanakan pelayanan masyarakat;
- memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- menetapkan kebijakan teknis operasional ;
- merumuskan perencanaan program ;
- melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
- menyelenggarakan pelayanan masyarakat;
- melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum;
- melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
- melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

#### i. Sekretaris Kelurahan

Tugas : membantu Lurah dalam menyusun kebijakan teknis operasional dan pelaporan, mengoordinasikan seksi,

membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, kelembagaan.

Fungsi :

- menyusun rancangan kebijakan teknis dan pelaporan kelurahan;
- melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas seksi;
- menyusun program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan kelurahan;
- melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
- menyusun rancangan peraturan perundang-undangan kelurahan;
- melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- melaksanakan analisis jabatan dan beban kerja;
- melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan kelurahan;
- menyusun profil kelurahan;
- melaksanakan inventarisasi aset kekayaan daerah yang ada di kelurahan;
- melaksanakan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM) dan/atau pelaksanaan pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan kelurahan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

j. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

Tugas : menyelenggarakan dan membina administrasi pemerintahan, kependudukan, ketentraman dan ketertiban, dan pertanahan serta mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

Fungsi :

- mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di tingkat Kelurahan;

- melaksanakan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional ditingkat kelurahan;
- melaksanakan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa ditingkat kelurahan;
- melaksanakan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, fasilitasi pemilihan umum;
- melaksanakan kegiatan pemerintahan di kelurahan;
- menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di tingkat kelurahan;
- menyusun profil kelurahan;
- melaksanakan pembinaan perlindungan masyarakat;
- melaksanakan pencegahan, penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- melaksanakan pendataan dan pelaporan administrasi kependudukan;
- melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga masyarakat di tingkat kelurahan;
- melaksanakan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- melaksanakan pengoordinasian dan pelaporan kejadian ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah kelurahan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

k. Seksi Pelayanan Publik

Tugas : penyelenggaraan sebagian urusan bidang pelayanan publik di Kelurahan.

Fungsi :

- pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat Kelurahan;
- melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
- melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas di kelurahan dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- melaksanakan pelayanan masyarakat berupa pemberian pengantar penertiban Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan keterangan penduduk lainnya;
- melaksanakan pemberian pengantar dan surat keterangan serta legalisasi yang dibutuhkan masyarakat;
- mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

#### I. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Tugas : melakukan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perekonomian, menyiapkan program pembinaan keagamaan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup

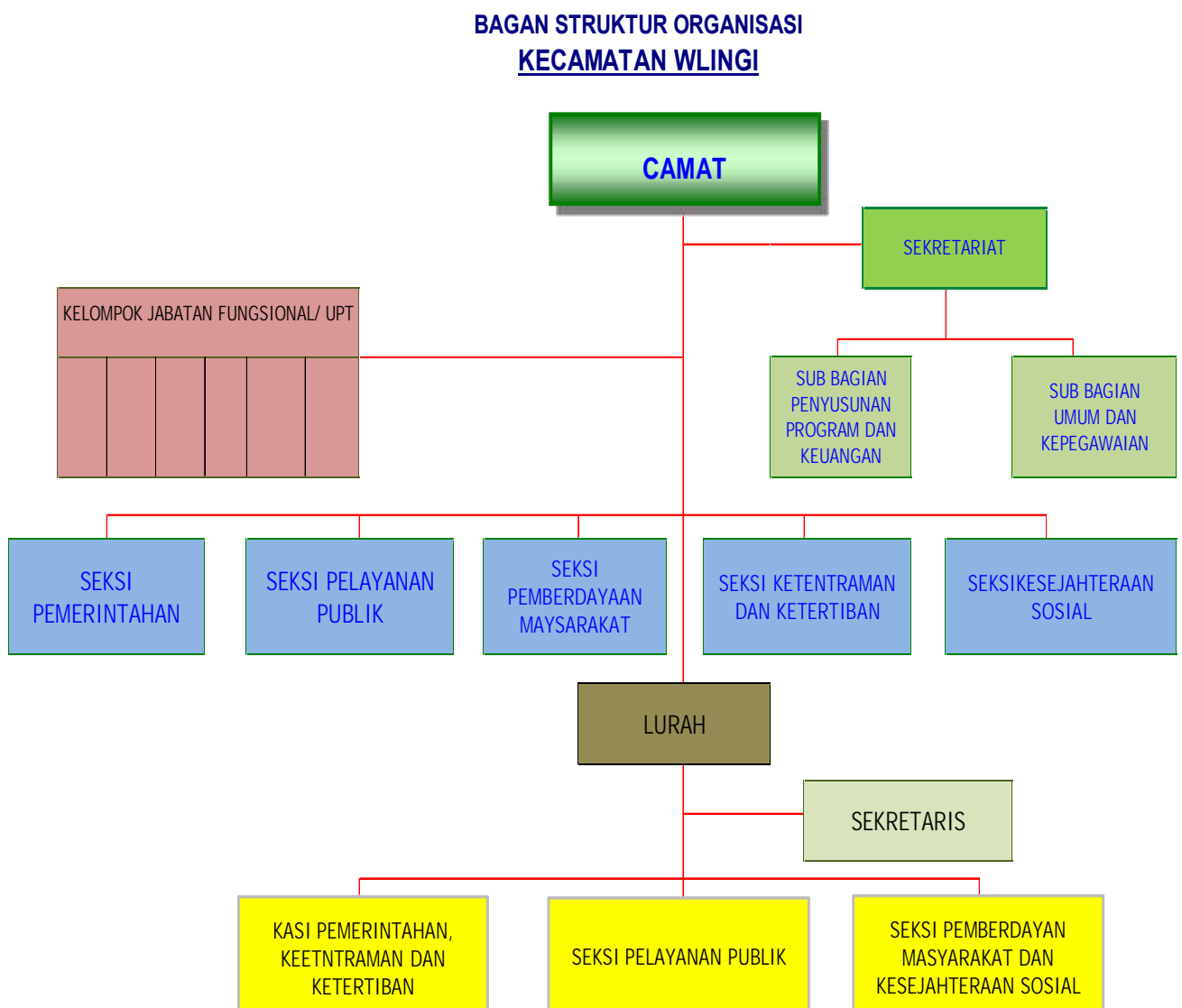
Fungsi :

- mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di tingkat Kelurahan;
- melaksanakan fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan;
- melaksanakan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia;
- melaksanakan fasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat;
- melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pembangunan di kelurahan;

- melaksanakan fasilitasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kesehatan masyarakat kelurahan;
- melaksanakan fasilitasi program penanggulangan kemiskinan;
- mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

Di dalamnya juga disebutkan tata kerja OPD Kecamatan Wlingi disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit kerja menerapkan prinsip koordinasi dengan selalu melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya dan bertanggungjawab memimpin serta mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Kecamatan Wlingi bisa dilihat dari Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Wlingi dibawah ini :

Gambar 2.1.1



## 2.2. Sumber Daya OPD

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar memiliki pegawai sebanyak 42 orang. Sumber daya manusia di lingkungan Kecamatan Wlingi, lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.1.1

#### Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Jenis Eselon	Jumlah
1	Eselon III a	2 Orang
2	Eselon IV a	10 Orang
3	Eselon IV b	22 Orang
	Jumlah Keseluruhan	34 Orang

Tabel 2.2.1.2

#### Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	S2	3 Orang
2	S1	30 Orang
3	SMA/SEDERAJAT	8 Orang
4	SMP	1 Orang
	Jumlah Keseluruhan	42 Orang

Tabel 2.2.1.3

#### Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Penempatan Pegawai

No	Lokasi Penempatan	Jumlah
1	Kecamatan Wlingi	12 Orang
2	Sebagai Sekretaris Desa	1 Orang
3	Kelurahan	29 Orang
	Jumlah Keseluruhan	42 Orang

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, sebanyak 42 orang memiliki pendidikan S2 sebanyak 3 orang ( 7,14%), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 30 orang ( 71,43%), yang memiliki pendidikan SLTA, sebanyak 8 orang

(19,05%), yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 1 orang (2,38%) sedangkan berdasarkan penempatan pegawai di Kecamatan Wlingi 12 orang (28,57%) dan diperbantukan sebagai sekretaris Desa 1 orang (2,38%) dan penempatan di Kelurahan 29 Orang (69,05,%) sehingga penempatan pegawai yang ada di kecamatan dirasa sangat kurang sehingga mempengaruhi kinerja pegawai karena banyak pegawai yang overload/kelebihan beban pekerjaan.

#### 2.2.2. Sarana Dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar masih dirasa kurang hal tersebut bisa dilihat dari masing-masing kasi belum semuanya mendapat fasilitas prasarana kerja seperti laptop/komputer dan printer sehingga satu komputer dan printer digunakan secara bersama-sama secara bergiliran, hal ini menjadikan pegawai kecamatan kurang fokus, tidak semangat dalam bekerja baik pekerjaan sesuai tupoksi ataupun tugas yang lainnya. Secara umum sarana dan prasarana Kecamatan Wlingi dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :

DAFTAR RINCIAN ASET KECAMATAN TAHUN 2016

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Tanah bangunan gedung/lapangan	25	Buah
2	Peralatan dan mesin		
	- Laptop	30	Buah
	- Printer	42	Buah
	- Komputer PC	26	Buah
	-Scanner	3	Buah
	-Proyektor	4	Buah
	-Soundsystem	18	Buah
	- AC	6	Buah
	-Televisi	10	Buah
	- Lemari Pendingin	2	Buah
	- Mesin Potong Rumput	13	Buah
	- Meja Pejabat	29	Buah
	- Kursi Pejabat	31	Buah
	- Meja rapat	18	Buah
	-Kursi Rapat	231	Buah
	- Meja Pelayanan	7	Buah
	- Kursi Staf	43	Buah
	- Meja Staf	49	Buah
	- Bangku Tunggu	13	Buah
	-Lemari Buku/Arsip	55	Buah
	- Filing Kabinet	11	Buah
	-Papan Pengumuman/Whiteboard	16	Buah
	-Meja komputer	25	Buah
3	Gedung dan Bangunan		Buah
	- Gedung kantor	49	Buah
	- Gedung tempat pertemuan	11	Buah
	- Rumah Negara	3	Buah
	- Gedung tempat ibadah	2	Buah
	- Garasi/Parkir	2	Buah
	TOTAL	774	Buah

Berdasarkan daftar rincian asset yang bersumber dari buku inventaris gabungan Kecamatan Wlingi sebenarnya sudah cukup memadai dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi namun demikian memang masih ada barang yang urgent dan perlu pengadaan yaitu mesin genset dimaksudkan untuk menaggulangi terhentinya pelayanan seandainya terjadi pemadaman listrik sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, selain itu juga penambahan AC yang masih berjumlah 6 buah, diperlukan penambahan 6 buah lagi untuk menambah kenyamanan masyarakat di ruang pelayanan dan kepuasan aparatur.

### 2.3. Kinerja OPD Kecamatan Wlingi

Potensi dan permasalahan pelayanan OPD Kecamatan Wlingi dapat digambarkan dan disajikan dalam tabel 2.3.1 dengan mengemukakan :

- a. Terjadi kesenjangan atau gap pelayanan dikarenakan adanya kegiatan baru yang pada tahun sebelumnya tidak ada dan adanya kegiatan yang tahun sebelumnya ada menjadi hilang sehingga rasio pencapaian pelayanan tidak terukur dengan baik yang menyebabkan kesenjangan pelayanan menjadi sedikit melebar;
- b. Beberapa Pelayanan yang telah mencapai target kinerja adalah :
  - Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi tahun 2016;
  - Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2015
  - Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan tahun 2012 s/d 2015;
  - Fasilitasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan tahun 2012, 2013 dan 2014 s/d 2016 kegiatan dihilangkan;
  - Terwujudnya Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitas Pemerintah Desa/Kelurahan tahun 2012, 2013 dan 2014 s/d 2016 kegiatan dihilangkan;
  - Kegiatan baru yang ada pada tahun 2014 antara lain :
    - Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2015;
    - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan tahun 2015;

- Terlaksananya Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi PKK Kelurahan tahun 2015.
- c. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan tersebut :
- Konsistensi penyusunan program, kegiatan dan keuangan;
  - Kebutuhan pelayanan yang selalu ada di setiap tahunnya;
  - Loyalitas aparatur terhadap pimpinan;
  - Mayoritas Pendidikan aparatur sarjana sehingga memudahkan dalam mengimplementasi kegiatan yang ada.
- d. Beberapa Pelayanan yang belum mencapai target kinerja adalah :
- Tersedianya Administrasi Perkantoran tahun 2012 s/d 2016;
  - Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi tahun 2012, 2013, dan 2016;
  - Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan dan capaian kinerja tahun 2015 dan 2016;
  - Fasilitasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan dan Terwujudnya Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitas Pemerintah Desa/Kelurahan yang dihilangkan mulai tahun 2014;
  - Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2012, 2013 mulai ada tahun 2014;
  - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan tahun 2012, 2013 mulai ada tahun 2014;
  - Terlaksananya Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi PKK Kelurahan tahun 2012, 2013 mulai ada tahun 2014;
  - Terlaksananya Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Hibah Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni;
  - Terlaksananya Bintek Pengelolaan Keuangan Aparatur se Kecamatan;
  - Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Masyarakat Kelurahan;
  - Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
  - Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah untuk Kelurahan;
  - Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa
- e. Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan antara lain :

- Seringnya terjadi mutasi pegawai terutama pegawai yang mempunyai tugas strategis seperti bendahara pengeluaran;
  - Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya pemahaman tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang bersangkutan;
  - Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
  - Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Kelurahan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali overload;
  - Masih belum optimalnya penyediaan alat tulis kantor, sarana dan prasarana, pemeliharaan alat-alat kantor sehingga kenyamanan pegawai menjadi terganggu;
  - Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;
  - Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
  - Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien;
  - Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan (komputer).
- f. Dari hasil interpretasi tersebut diatas maka dapat digambarkan potensi dan permasalahan pelayanan OPD Kecamatan Wlingi yang selalu terulang dari tahun ke tahun sehingga secara garis besar rasio pencapaian kinerja pelayanan sangatlah kurang sehingga perlu adanya pembenahan dalam pengelolaan keuangan OPD.

Sedangkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan OPD Kecamatan Wlingi dapat digambarkan dan disajikan dalam tabel 2.3.2 mengemukakan :

- a. rasio antara realisasi dan anggaran di Kecamatan Wlingi kurang baik dikarenakan anggaran dengan realisasi tidak berbanding lurus, pernyataan tersebut dapat dilihat pada rata-rata pertumbuhan baik anggaran maupun realisasi jika kita lihat di tabel 2.3.2 kolom 18 dan 19 maka pertumbuhannya untuk realisasi lebih kecil;
- b. faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan OPD Kecamatan Wlingi antara lain :
  - prosedur/mechanisme penyusunan anggaran kas yang tidak proposional;
  - lemahnya pengawasan internal terkait penyerapan dana;

- kurangnya sarana komputer dan printer di setiap kasi;
  - kurangnya staf yang membantu kasi dalam penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan sehingga kasi sering overload pekerjaan;
  - progres pelaksanaan kegiatan yang tidak jelas.
- c. Hasil interpretasi diatas menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan OPD Kecamatan Wlingi, sehingga masih perlu banyak pembenahan dalam hal pencairan dan perencanaan kegiatan.

**TABEL 2.3.1**  
**CAPAIAN KINERJA RENSTRA SEBELUMNYA**

No	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	20%	24%	29%	37%	48%
2	Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	24%	29%	37%	48%
3	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja Kecamatan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	95%	100%	19%	24%	30%	35%	48%
4	Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	95%	100%	19%	24%	30%	35%	48%
5	Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	60%	61%	62%	63%	65%	80%	85%	86%	90%	65%	20%	25%	30%	39%	36%

**TABEL 2.3.2**  
**ANGGARAN DANA REALISASI OPD**  
**KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011-2016**

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	BELANJA	916,548,224	1,097,359,012	1,251,729,000	1,129,806,000	9,241,501,646	879,655,832	1,086,549,124	1,045,896,887	1,124,052,548	9,013,482,909	0%	19%	16%	22%	90%	58.75%	59.26%
2	BELANJA OPERASI	906,736,224	1,028,109,012	1,170,829,000	1,040,829,000	4,095,894,270	869,855,832	1,017,449,124	965,450,887	1,035,699,548	3,961,782,709	0%	15%	10%	16%	78%	35.20%	35.42%
3	Belanja Pegawai	807,615,874	905,404,900	1,023,583,000	869,320,000	3,239,481,000	770,986,582	895,893,074	818,844,187	864,247,448	3,172,221,689	0%	14%	6%	11%	76%	32.02%	32.70%
4	Belanja barang dan jasa	99,120,350	122,704,112	147,246,000	171,509,000	856,413,270	98,869,250	121,556,050	146,606,700	171,452,100	789,561,020	0%	19%	33%	42%	87%	53.92%	51.52%
5	BELANJA MODAL	9,812,000	69,250,000	80,900,000	88,977,000	5,145,607,376	9,800,000	69,100,000	80,446,000	88,353,000	5,051,700,200	0%	86%	88%	89%	100%	249.89%	248.69%
6	Belanja Peralatan dan Mesin	9,812,000	69,250,000	80,900,000	61,677,000	785,219,287.00	9,800,000	69,100,000	80,446,000	61,353,000	760,839,000	0%	86%	88%	84%	99%	140.24%	138.79%
7	Belanja Bangunan dan gedung	-	-	-	27,300,000	2,075,455,722	-	-	-	27,000,000	2,026,606,000				100%	100%		
	Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan	-	-	-	-	2,128,832,367	-	-	-	-	2,109,221,200					100%		
	Belanja Aset tetap lainnya	-	-	-	-	106,100,000	-	-	-	-	105,884,000					100%		
	Belanja Aset lainnya	-	-	-	-	50,000,000.00	-	-	-	-	49,150,000					100%		

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Kecamatan Wlingi

Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum (publik) di Kecamatan Wlingi masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut, misalnya keterbatasan sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani dengan murah senyum, tidak jelasnya waktu, dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik.


Oleh karenanya Kecamatan Wlingi diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa Kecamatan Wlingi dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik masa kini (new publik management) yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang "menyentuh hati" dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (shareholder) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari "dilayani" menjadi "melayani".

Posisi Kecamatan Wlingi menjadi sangat penting mengingat berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kabupaten dan hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar pada lima tahun mendatang maka dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Wlingi ditetapkan sebagai Kawasan Strategis yaitu kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi pengembangan meliputi Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan terutama peternakan sapi perah dan peternakan ayam petelur tetapi tidak menutup kemungkinan mempunyai usaha Industri kecil dan mikro meliputi industri gula kelapa, industri minyak atsiri, industri kue dan makanan, industri batu bata, industri jamu dan apabila dikelola dengan manajemen dan campur tangan pemerintah kabupaten blitar dalam hal pengemasan dan pemasaran produk industri ini bisa menjadi besar, banyak pihak berharap agar Kecamatan Wlingi mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat.

Fungsi Kecamatan Wlingi sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di pelayanan yang bersifat administratif dimana pemerintah menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kecamatan Wlingi mencoba menganalisa Pencapaian Indikator Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI, agar lebih jelas sarana dan prasarana apa saja yang dirasa oleh Kecamatan Wlingi harus diperbaiki dan perlu dikembangkan hal tersebut semata – mata hanya untuk melakukan yang terbaik kepada masyarakatnya.

Tabel 2.4.1  
Pencapaian Indikator Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik  
Versi Ombudsman RI

No	Variabel Penilaian	Ada/tdk	Foto
1.	Pelayanan Terpadu Satu Atap / Satu Pintu	ada	
2.	Standar Layanan		
	Dasar Hukum	ada	UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAAYANAN PUBLIK
	Persyaratan Layanan	ada	
	SOP Layanan	ada	Terdiri dari : 1. SOP Pengantar SKCK 2. SOP Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

			3. SOP Penerbitan Kartu Keluarga 4. SOP Ijin Usaha Mikro dan Kecil 5. SOP Pengantar Pindah Tempat
	Bagan Alur Layanan	ada	
	Produk Layanan	ada	
	Jangka Waktu Layanan	ada	
	Biaya / Tarif Layanan	ada	
3.	Sarana, Prasarana atau Fasilitas		
	Ruang Tunggu	ada	
	Pendingin Ruangan / AC di Unit Layanan	ada	
	Tempat Duduk	ada	
	Sarana Antrian	Tdk ada	
	Toilet	Ada	
	Televisi	Ada	
	Loket / Meja Pelayanan	ada	
	Tempat Parkir	ada	

	Profile petugas /Person In Charge/ Jumlah Pelaksana	ada	3 Orang
	Tata tertib Layanan	Tdk ada	
	Kode Etik layanan	Tdk ada	
4.	Maklumat Pelayanan	Tdk ada	
5.	Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)	Tdk ada	
6.	Sarana Bagi Berkebutuhan Khusus		
	Ram	Tdk ada	
	Jalur Pemandu	Tdk ada	
	Pegangan Rambatan	Tdk ada	
	Toilet Khusus di Unit pelayanan	Tdk ada	
	Ruang Khusus ibu menyusui dan Anak	Tdk ada	
	Loket khusus	Tdk ada	
7.	Pengelolaan Pengaduan		
	Deks/Unit/Fungsi pengaduan	Tdk ada	
	Pejabat Pengelola Pengaduan	Tdk ada	
	Loket pengaduan / Ruang pengaduan	Tdk ada	
	Sarana Pengaduan	Tdk ada	
	Prosedur / Tata cara pengaduan	Tdk ada	
	Informasi Hasil Pengelolaan pengaduan	Tdk ada	
8.	Sarana Pengukuran Kepuasan Pelanggan	ada	
9.	Visi dan Misi Pelayanan	ada	
10.	Moto Layanan	ada	
11.	ISO 9001-2008	Tdk ada	

12.	Atribut		
	Pakaian Seragam	Tdk ada	
	ID Card	Tdk ada	
	TOTAL NILAI		
	ZONA KEPATUHAN		

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :

Hasil indikator standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI masih terdapat banyak indikator variabel yang belum terpenuhi sehingga perlu adanya kepedulian semua pihak mulai dari pemerintah daerah kabupaten blitar sampai ke Kecamatan Wlingi untuk berkomitmen mewujudkannya.

❖ Solusi untuk Meningkatkan Penilaian Ombudsman adalah mencukupi semua indikator variabel di tahun 2016 antar lain :

- Standart Pelayanan :
  - Jangka Waktu
  - Biaya/Tarif Layanan
- Sarana, Prasarana/Fasilitas
  - Sarana Antrian
  - Tata Tertib Layanan
  - Kode Etik Layanan
- Maklumat Pelayanan
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SI PP)
  
- Sarana Bagi Berkebutuhan Khusus :
  - Ram
  - Jalur Pemandu
  - Pegangan Rambatan
  - Toilet Khusus di Unit Pelayanan
  - Ruang Khusus Ibu Menyusui dan Anak
  - Loker Khusus
- Pengolahan Pengaduan :
  - Deks/Unit/Fungsi pengaduan
  - Pejabat Pengelola Pengaduan
  - Loker pengaduan / Ruang pengaduan
  - Sarana Pengaduan

- Prosedur / Tata cara pengaduan
- Informasi Hasil Pengelolaan pengaduan
- Sarana Pengukuran Kepuasan Pelanggan
- Visi dan Misi Pelayanan
- Moto Layanan
- ISO 9001-2008
- Atribut
  - Pakaian Seragam
  - ID Card

# BAB III

## ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan OPD Kecamatan Wlingi

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang berkaitan dengan Tugas umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Wlingi, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Wlingi dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Wlingi sebagai berikut :

1. Belum adanya penilaian yang terukur terhadap kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Wlingi yang dilakukan oleh Kabupaten Blitar;
2. Belum adanya penilaian yang terukur terhadap akuntabilitas kinerja Kecamatan Wlingi yang dilakukan oleh Kabupaten Blitar;
3. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Wlingi.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Wlingi dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Wlingi, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan dan belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;
2. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat OPD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk OPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
3. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
4. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya pemahaman tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang bersangkutan;
5. Tingkat koordinasi antar lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
6. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (metode swakelola).

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Wlingi sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Kelurahan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali overload;
2. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan;

Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Wlingi sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Wlingi, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien;
5. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan (komputer).

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintahan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar adalah :

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan disebutkan bahwa perangkat Daerah yang terkecil adalah Kecamatan sehingga kedudukan kelurahan merupakan bagian dari kecamatan yang mempunyai tugas membantu pekerjaan kecamatan di wilayah kelurahan
2. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan yang besar kepada Camat yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama antara kecamatan dengan kelurahan;
3. Pelimpahan kewenangan kepada Camat belum sepenuhnya didukung dengan personil, pembiayaan dan prasarana.

Berdasarkan permasalahan – permasalahan yang disebutkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa isu - isu strategis yang dihadapi oleh

Pemerintah Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 2016 - 2021, adalah sebagai berikut :

#### 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dimasa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

#### 2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kabupaten blitar terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excellent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint.

Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai "pelayan masyarakat". Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Wlingi dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya

merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sector penyelenggara Negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

### 3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen public yang baik.

Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen public lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan public yang lebih responsive dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, Muspika, Tomas dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai stakeholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

#### 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan asset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

System manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta system pengawasan internal. Tuntutan pembaharuan system keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas public (public accountability).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan.

Setiap tahap mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan asset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislative. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- (1) terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan system pelaporan;
- (2) terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- (3) pengamanan barang daerah;
- (4) tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Blitar tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021 yaitu :

“MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”.

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut : Kabupaten Blitar adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya yang artinya Kabupaten Blitar dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak dulu hingga sekarang. Lebih Sejahtera berarti lebih meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Maju dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Berdaya Saing dimaknai dengan terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komperatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

Keterpaduan antara lebih sejahtera, maju dan berdaya saing adalah sebuah manifestasi akan sebuah bentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Blitar untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kabupaten lainnya. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah - langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi, adapun Misi tersebut terdiri dari :

1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat;
2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing;

6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan;

Berdasarkan tugas pokok Kecamatan Wlingi yaitu meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan sehingga misi kepala daerah terpilih yang sesuai dan berhubungan dengan Kecamatan Wlingi yaitu Misi ke-4 tentang meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan Misi ke-6 tentang Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan.

Adapun strategi dan arah kebijakan Misi ke-4 antara lain :

1. Strategi kesatu, melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel;  
Arah kebijakan : peningkatan konsistensi terhadap dokumen perencanaan
2. Strategi Kedua, mengoptimalkan perencanaan sistem pengawasan internal  
Arah Kebijakan : peningkatan kapasitas aparatur pengawasan internal pemerintah
3. Strategi Ketiga, meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah;  
Arah Kebijakan : peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah
4. Strategi Keempat, menata struktur kelembagaan pemerintah daerah lebih efektif dan efisien;  
Arah Kebijakan : penataan struktur kelembagaan daerah sesuai kebutuhan daerah
5. Strategi Kelima, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah;  
Arah Kebijakan : menerapkan pembinaan kinerja aparatur
6. Strategi Keenam, menerapkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan efisien;  
Arah Kebijakan : peningkatan standart kualitas pelayanan OPD

Sedangkan strategi dan arah kebijakan Misi ke-6 antara lain :

1. Strategi Kesatu : memperkuat kelembagaan pemerintah desa.  
Arah Kebijakan : 1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.  
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa
2. Strategi Kedua : Mengembangkan kawasan perdesaan.

Arah Kebijakan : pemetaan, pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal.

3. Strategi Ketiga : meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Arah Kebijakan : peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kecamatan Wlingi mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang bertujuan untuk :

- memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat
- mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
- memperpendek proses pelayanan
- mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau

Tetapi di dalam proses pelaksanaannya Kecamatan Wlingi masih mengalami hambatan diantaranya :

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Kelurahan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali overload;
- b) Masih belum optimalnya Kecamatan Wlingi dalam memahami program dan kegiatan yang dituangkan dalam DPA OPD;
- c) Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;

Berdasarkan hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, maka perlu dilakukan rencana strategis oleh Kecamatan Wlingi, antara lain :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik);
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah;
3. Peningkatan Penataan Organisasi dan Manajemen Publik;
4. Peningkatan pemahaman tentang Pengelolaan Keuangan dan Barang

Rencana strategis yang akan dilakukan Kecamatan Wlingi inilah yang merupakan indikator kunci keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals).

### 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar adalah Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah terciptanya Kabupaten Blitar sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. RTRW berfungsi sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Blitar.

RTRW Kabupaten Blitar menjadi pedoman untuk :

- a. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- e. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan
- f. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Rencana Pengembangan Kecamatan Wlingi :

1. Rencana sistem pusat kegiatan sesuai dengan pasal 15 ayat 4 huruf b yaitu Perkotaan Wlingi yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan pendidikan, industri pengolahan, pusat pengembangan transportasi;
2. Rencana sistem jaringan prasarana utama wilayah sesuai pasal 18 ayat 1 huruf a yaitu Jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer
3. Sesuai dengan pasal 18 ayat 4 Rencana jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai jalan lokal primer
4. Sesuai pasal 19 Rencana jaringan perkeretapiian sebagai stasiun induk kabupaten

5. Sesuai Pasal 21 Rencana prasarana lalu lintas berupa pengembangan terminal tipe B yaitu Terminal Wlingi di Kabupaten Blitar
6. Pasal 22 huruf d peningkatan status terminal Wlingi dan Pasal 22 huruf f memasukkan tempat pengujian bermotor yang berada di Kecamatan Wlingi
7. Pasal 28 ayat 2 Rencana sistem jaringan persampahan berupa pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk menampung dan mengelola sampah dan ayat 4 Rencana sistem pengelolaan air limbah meliputi pengelolaan limbah non domestik terdapat di perkotaan Wlingi dan ayat 6 Rencana jalur evakuasi bencana meliputi jalur dan ruang evakuasi bencana Letusan Gunung Kelud meliputi titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Wlingi dengan jalur dan ruang evakuasi di Balai Kelurahan Babadan, Dukuh Galor Tembalang, Balai Kelurahan Beru, Tangkil, Wlingi, dan lapangan Desa Ngadirenggo, sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana longsor melalui evakuasi Kecamatan Wlingi – Kecamatan Talun – Kecamatan Selorejo – Kecamatan Kesamben
8. Pasal 31 huruf a sebagai Kawasan hutan lindung yang meliputi BKPH Wlingi meliputi Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Garum;
9. Pasal 32 ayat 2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, sebagai kawasan resapan air
10. Kawasan Perlindungan Setempat Pasal 33 ayat 3 sebagai kawasan sempadan sungai berjarak 100 (seratus) meter dari kiri kanan sungai besar Brantas, ayat 7 Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dengan diarahkan dengan luas minimum kurang lebih 8.937 (delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh) hektar atau 30% dari kawasan perkotaan yang direncanakan untuk kawasan perkotaan yang memiliki perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan perkotaan yang ada di sekitarnya, salah satunya perkotaan Wlingi = 567,27 ha
11. Kawasan Cagar Budaya Pasal 34 ayat 2 Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lingkungan non gedung, lingkungan bangunan non gedung, dan lingkungan bangunan gedung salah satunya Prasasti Munggut, Candi Sirahkencong di Kecamatan Wlingi
12. Kawasan Rawan bencana Alam 35 ayat 2 Kawasan rawan bencana longsor, ayat 3 Kawasan rawan bencana banjir, ayat 4 Kawasan rawan bencana alam yang biasanya berhubungan dengan wilayah yang terdapat tambang/ galian tipe C

13. Kawasan Cagar Geologi Pasal 36 ayat 3 Daerah rawan bencana letusan gunung Kelud
14. Kawasan peruntukan hutan produksi Pasal 39 huruf k dengan jenis tanaman mahoni dan sengon
15. Kawasan Peruntukan Pertanian Pasal 41 ayat 4 meliputi :
  - Sawah irigasi
  - Sawah bukan irigasi
  - Kawasan perkebunan meliputi Budidaya tebu, budidaya tembakau lokal, Virginia, budidaya nilam budidaya kakao, budidaya cengkeh, budidaya kelapa, budidaya kopi, budidaya kenanga, budidaya karet dan budidaya the.
  - Kawasan peternakan meliputi : Pengembangan peternakan besar yang meliputi sapi potong, Pengembangan peternakan besar sapi perah
  - pengembangan peternakan kecil dan unggas yang meliputi, kambing, domba, babi, ayam kampung, ayam ras dan itik
16. Kawasan peruntukan perikanan budidaya Pasal 42 ayat 3 sebagai komoditas koi dan komoditas ikan hias dan Kawasan Minapolitan berupa komoditas utama yaitu ikan koi, sedangkan komoditas pendukung berupa ikan Gurame, Nila dan Lele
17. Kawasan Peruntukan Pertambangan pasal 43 ayat 2 Pertambangan mineral meliputi sirtu dan batu gunung (adesit)
18. Kawasan Peruntukan Industri Pasal 44 pasal 3
  - Industri kecil dan mikro meliputi industri industri kue dan makanan, pande besi, genteng, batubata, jamu dan tape
  - Pergudangan
19. Kawasan Peruntukan Pariwisata Pasal 45 ayat 2 Kawasan wisata Alam Sungai berupa arung jeram di Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi; wisata Alam pegunungan berupa Obyek Wisata Gunung Kelud, Gunung Sumbing dan Gunung Gedog.dan wisata Agro perkebunan Sengon dan Pijiombo, juga kawasan wisata budaya dan ilmu pengetahuan di Candi Sirahkencong
20. Kawasan Peruntukan Lainnya Pasal 48 ayat 3 Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi :
  - kompleks markas Kepolisian Sektor (POLSEK)
  - Komando Rayon Militer (Koramil)
  - daerah latihan militer YONIF-511/DY

21. Penetapan Kawasan Strategis Pasal 54 ayat 3 sebagai pengembangan pusat kegiatan lokal promosi ( PKLp) Perkotaan Wlingi yang meliputi, Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Perkotaan Wlingi, pembangunan pusat perdagangan pasar induk Wlingi, pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi stasiun Wlingi

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan permasalahan yang ada meliputi :

- Keberadaan parkir kendaraan umum dan besar dikawasan pasar Wlingi dan sangatlah mengganggu pemandangan dan, keindahan dan lalu lintas di jalan utama Kecamatan Wlingi sehingga perlu adanya penertiban parkir secara terus menerus sehingga tumbuh perilaku budaya tertib parkir;
- Tempat penampungan sampah akhir (TPA) di Kecamatan Wlingi dipusatkan pada desa Tegalasri sehingga perlu adanya pengelolaan sampah organik dan non organik di kawasan perkotaan Wlingi yang bisa menjadi nilai jual untuk masyarakat sekitarnya dan mengurangi volume sampah yang setiap harinya bertambah dan penanggulangan banjir;
- Pembuatan saluran air di tepi jalan yang sampai sekarang banyak yang belum diwujudkan hal tersebut untuk mengantisipasi datangnya curah hujan yang cukup tinggi yang dapat menyebabkan banjir.
- Kurangnya pohon peneduh dan taman hias di sepanjang jalan utama/protokol sehingga diperlukan penambahan pohon dan tamanisasi supaya Kota Wlingi tampak lebih sejuk, indah dan asri terutama dalam mendukung Kecamatan Wlingi sebagai Kota Adipura
- Kurangnya tempat sampah ditepi jalan beserta perawatannya, sehingga memerlukan penambahan tempat sampah dan partisipasi masyarakat sekitar dalam perawatannya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Blitar Tahun 2011 -2031, Kecamatan Wlingi yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup maka sangat diperlukan sekali kerjasama yang baik antara aparaturnya penyelenggara pemerintah, pengusaha dan masyarakat untuk bersinergi mewujudkan Kota Wlingi sebagai Kota Idaman Hati ( Indah, Aman, Nyaman, Sehat Tertib) dan Kota Adipura.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Wlingi secara langsung baik anggaran maupun kebijakan memang tidak berkaitan dengan KLHS tetapi secara tidak langsung penetapan Kecamatan Wlingi sebagai Kawasan Strategis menuju terciptanya Kabupaten Blitar sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang

berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah mempunyai dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh Kecamatan Wlingi.

#### 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Blitar.

8 Isu strategis Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Daya saing kompetitif dalam bidang ekonomi;
2. Ketersediaan infrastruktur yang memadai;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban keamanan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
5. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
6. Pengembangan potensi pariwisata
7. Kerjasama yang konstruktif antara pemerintah dengan dunia usaha dan pemerintah dengan pemerintah
8. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang timbul dari tahun – tahun sebelumnya dan berdasarkan telaah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar meliputi :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.

- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis Kabupaten Blitar berhubungan dengan isu-isu Kecamatan Wlingi terutama pada point 4 Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan point 5 pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sedangkan isu-isu yang lainnya memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Blitar yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan;
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas;
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

## BAB IV

### VISI , MISI , TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Kecamatan Wlingi harus mengacu kepada Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar sebagai berikut :

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran  
RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021**

<b>VISI: "MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING"</b>										
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL [2015]	TARGET INDIKATOR KINERJA					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Misi I: Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat</b>										
1. Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	1. Pertumbuhan ekonomi (%)	1. Menurunnya angka kemiskinan	a. Angka Kemiskinan (%)	10,22	10-10,22	9,9-10	9,3-9,9	9,7-9,8	9,6-9,7	≤ 9,6
			b. Pendapatan per kapita (juta rupiah)	23,39 <sup>a</sup>	23,97	28,24	30,8	33,72	37,31	40,35
	2. Indeks Gini	2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	c. Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,79	2,78	2,77	2,75	2,73	2,71	2,70
			Predikat Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Sedang	Baik	Baik	Baik	Beik	Beik	Beik
<b>Misi II: Memantapkan Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan (Religius), Kearifan Lokal dan Hukum</b>										
2. Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif	Angka kriminalitas yang tertangani (%)	3. Terwujudnya stabilitas wilayah	a. Persentase penanganan konflik (%)	100	100	100	100	100	100	100
			b. Persentase penegakan PERDA (%)	95	95	95	95	100	100	100
<b>Misi III: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)</b>										
3. Mewujudkan SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,57	0,57	0,58	0,58	0,59	0,60	0,60

Activate Win



VISI: "MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING"										
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET INDIKATOR KINERJA					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
		5. Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,82	0,83	0,83	0,84	0,84
<b>Misi IV: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>										
4. Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	6. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	a. Nilai SAKIP	C	CC	CC	B	B5	A	A
			b. Peningkat Pambias LPFD se-Jawa Timur	30	30 besar	30 besar	30 besar	20 besar	20 besar	
		7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	c. Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
			d. Prediktor Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
<b>Misi V: Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Memiliki Daya Saing</b>										
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan sistem inovasi Daerah (SID) dan memperhatikan daya dukung lingkungan	PDRB ADHD (Triksa Pupuh)	8. Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata	a. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	17,01%	17,00	17,51	18,01	18,51	19,01	19,51
			b. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	12,86%	13,04	13,36	13,86	14,36	14,86	15,36
			c. Kontribusi pertanian terhadap PDRB %P	35,89%	35,76	35,63	35,56	35,43	35,32	35,21
			d. Persentase peningkatan PAD dari sektor pariwisata %	1,2	1,20	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7



VISI: "MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING"										
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET INDIKATOR KINERJA					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
		9. Meningkatnya pelayanan perijinan	Prediktor KIM Layanan Perijinan	Sedang	Daik	Daik	Daik	Daik	Daik	Daik
		10. Efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan	a. Persentase ketastan terhadap RTRW (%)	75	77	79	80	82	84	85
			b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,31	66,7	67	68	69	70	71
<b>Misi VI: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan</b>										
6. Meningkatkan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	11. Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase desa tertinggal (%)	22,7	20,45	16,30	11,61	7,27	3,64	0

Catatan: \*) data sementara bersumber dari BPS Kabupaten Blitar

#### 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Kecamatan Wlingi

Tujuan adalah antitesis dari rumusan isu-isu strategis yang dihasilkan dari telaah berbagai sumber yang telah dilakukan sebelumnya. Perumusan Tujuan harus ekuivalen dengan Isu strategis, tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi Kabupaten Blitar. Sedang Sasaran merupakan ukuran yang bisa menunjukkan pencapaian Tujuan Pembangunan. Di dalam sasaran melekat Indikator Sasaran. Dalam rangka melaksanakan Rencana pembangunan daerah Lima Tahun Kedepan maka OPD Kecamatan Wlingi maka harus mengacu pada Visi dan Misi kepala Daerah terpilih. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka Kecamatan Wlingi melaksanakan 2 misi dari 6 misi RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 yaitu misi ke 4 dan 6. Pada Misi ke 4 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan untuk mewujudkan misi ke-4 (empat) tersebut dapat dicapai melalui beberapa tujuan yaitu :

- 1). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
- 2). Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang professional;

Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dicapai dengan sasaran :

1. Meningkatnya Meningkatnya pelayanan kesekretariatan kecamatan dengan indikator sarannya Indeks Kepuasan Aparatur;
2. Mewujudkan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan pelaporan yang berkualitas dengan indicator sarannya skore saki OPD

Tujuan Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang professional dicapai dengan sasaran :

1. Meningkatnya pelayanan kecamatan dengan indikator sarannya Indeks kepuasan masyarakat.

Pada Misi Ke-6 (enam) yaitu meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan dicapai melalui tujuan Meningkatkan kemandirian Desa dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas administrasi desa/kelurahan dengan indikator sarannya Persentase peningkatan desa dengan administrasi berkualitas baik.

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Wlingi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Wlingi secara memadai, serta menetapkan target

kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar beserta kinerjanya disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.1.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan	Indeks Kepuasan Aparatur	Data Dasar	NA	Baik	Baik	Baik	Baik
		Mewujudkan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan pelaporan yang berkualitas	Score SAKIP SKPD	CC	CC	B	BB	A	A
2	Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang profesional	Meningkatnya Pelayanan kecamatan	Indek Kepuasan masyarakat		NA	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
3	Meningkatkan Kemandirian Desa	Meningkatnya kualitas administrasi desa/kelurahan	Persentase peningkatan desa dengan administrasi berkualitas baik		NA	100%	100%	100%	100%

#### 4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD KECAMATAN WLINGI

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kecamatan Wlingi. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis, sebagai berikut :

##### 4.3.1 Analisis SWOT Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi ke-4 (empat) Kabupaten Blitar

maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis lingkungan strategis melalui pendekatan SWOT Analysis yang terdiri dari analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE).

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)
  - a. Kekuatan/Strenght (S)
    1. Loyalitas pegawai terhadap pimpinan;
    2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai;
    3. Adanya pelimpahan sebagian urusan Kabupaten Blitar kepada Camat tentang pengurusan ijin dan HO skala kecil;
    4. Adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
    5. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kecamatan Wlingi.
  - b. Kelemahan/Weakness (W)
    1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur;
    2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan;
    3. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    4. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
    5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi Informasi.
2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)
  - a. Peluang/Opportunity (O)
    1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai yang dibiayai dari dana APBD;
    2. Mudahnnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Wlingi, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Wlingi.
    3. Dukungan struktur stakeholder yang tinggi terkait dengan partisipasi masyarakat, nampak jelas dari penghargaan yang diterima Kecamatan Wlingi dalam memenangkan lomba baik tingkat Kabupaten maupun propinsi diselenggarakan oleh Kecamatan Wlingi;
    4. Kecamatan Wlingi sebagai pusat perdagangan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena Kabupaten Blitar terkenal

dengan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan baik di tingkat regional ataupun nasional.

b. Ancaman/Treaths (T)

1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan perangkat daerah terkecil adalah kecamatan dan kelurahan merupakan bagian dari kecamatan tetapi realisasinya tidak diikuti oleh pelimpahan Personil, Prasarana, Pembiayaan, (3-P) secara wajar atau semestinya;
4. Secara eksternal Kecamatan Wlingi lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Wlingi.

Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif Balance Score Card (BSC), yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 4 (empat) kebijakan umum, yang merupakan jembatan antara strategi dengan 6 (enam) program, yang selanjutnya dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.3.1.  
Analisis BSC**

No.	Perspektif	Strategi 1: melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	peningkatan konsistensi terhadap dokumen	Program Perencanaan ,

		perencanaan	Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3	Perspektif Kelembagaan	-	-
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 2: meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Perspektif Kelembagaan	-	-
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 3: meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	menerapkan pembinaan kinerja aparatur	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3	Perspektif Kelembagaan	-	-
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 4: menerapkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan efisien	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	peningkatan standart kualitas pelayanan OPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan</li> <li>• Program Pelayanan Kecamatan</li> </ul>
2	Perspektif Proses Internal	-	-

3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan partisipasi OPD dalam penentuan tema penelitian/ kajian di Bappeda	Program Penelitian dan Pengembangan
4	Perspektif Keuangan	-	-

#### 4.3.2 Strategi dan Rencana-Rencana Organisasi

Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian Visi dan Misi ke-4 tentang meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka perlu langkah strategis dan rencana organisasi sebagai berikut :

Langkah Strategis yang dijalankan :

1. Strategi kesatu, melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel;  
Arah kebijakan : peningkatan konsistensi terhadap dokumen perencanaan
2. Strategi kedua, meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah;  
Arah Kebijakan : peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Strategi ketiga, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah;  
Arah Kebijakan : menerapkan pembinaan kinerja aparatur
4. Strategi keempat, menerapkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan efisien;  
Arah Kebijakan : peningkatan standart kualitas pelayanan OPD

Langkah rencana organisasi yang perlu dilakukan :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan;

2. Membangun komitmen seluruh aparatur Kecamatan Wlingi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sesuai dengan jabatan masing-masing untuk mewujudkan akuntabilitas;
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Tabel 4.3.2

Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-4

VISI : Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing					
MISI IV : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi					
Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan pelayanan kesekretariatan kecamatan	melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel	peningkatan konsistensi terhadap dokumen perencanaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah	peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah	menerapkan pembinaan kinerja aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
		Mewujudkan dokumen Perencanaan, Penganggaran,			Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian

VISI : Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing					
MISI IV : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi					
Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
		dan pelaporan yang berkualitas			dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang profesional	Meningkatnya pelayanan kecamatan	menerapkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan efisien	peningkatan standart kualitas pelayanan OPD	Program Pelayanan Kecamatan
MISI VI : Meningkatkan Pembangunan Berbasis dan Kawasan Perdesaan					
Meningkatkan kemandirian desa	Meningkatkan kemandirian desa	Meningkatnya kualitas administrasi desa/kelurahan			Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

## BAB V

### RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam Bab ini merupakan Rencana Kinerja Kecamatan Wlingi selama 5 tahun kedepan yang memuat informasi tentang tujuan, sasaran yang ingin dicapai, Indikator Sasaran (Impact), Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan, Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output), Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2016), Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 5 tahun kedepan tahun 2017-2021, Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD (2021), Unit Kerja OPD Penanggung-jawab dan lokasi.

Adapun komponen tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan  
adalah antitesis dari rumusan isu-isu strategis yang dihasilkan dari telaah berbagai sumber yang telah dilakukan sebelumnya. Perumusan Tujuan harus ekuivalen dengan Isu strategis, tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi Kabupaten Blitar
2. Sasaran  
merupakan ukuran yang bisa menunjukkan pencapaian Tujuan Pembangunan, di dalam sasaran melekat Indikator Sasaran.
3. Indikator Sasaran (Impact)  
ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil pencapaian outcome dengan kata kunci "Apa yang ingin diubah"
4. Program  
Program – program yang ditetapkan merupakan program – program sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategik. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program – program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

5. Kegiatan  
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Kecamatan Wlingi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.
6. Indikator Kinerja Program (Outcome)  
ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertu sebagai hasil dari output dengan kata kunci "Apa yang ingin dicapai"
7. Indikator Kinerja Kegiatan (Output)  
ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan produk/barang/jasa yang dihasilkan dari proses/kegiatan yang menggunakan input dengan kata kunci "Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)"
8. Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2016)  
Berisikan tentang anggaran awal tahun 2016 beserta target kinerja program dan pendanaan sebagai acuan atau pembanding 5 tahun kedepan
9. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan  
Merupakan perjanjian kepala OPD Kecamatan Wlingi dengan Bupati Blitar dalam Program – program yang ditetapkan merupakan program – program sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategik beserta kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program tersebut
10. Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD (2021)  
Menggambarkan hasil akhir yang harus dipenuhi kepala OPD
11. Unit Kerja OPD Penanggung-jawab
12. Lokasi

Tabel 5.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
OPD Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (impact)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Lokasi
									2016		
									Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata Indeks kepuasan Aparatur	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan kecamatan	Indeks Kepuasan Aparatur	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kepuasan Aparatur	80%	476,369,270	80%	457,175,470	kecamatan dan kelurahan
					Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	27 Jenis	476,369,270	27 Jenis	457,175,470	
2					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarpras Aparatur dengan kondisi layak fungsi	80%	747,313,787	80%	713,635,300	kecamatan dan kelurahan
					Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarpras yang berfungsi baik	6 jenis	747,313,787	6 jenis	713,635,300	
3			Mewujudkan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang berkualitas	Score SAKIP OPD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu	100%	4,640,000	100%	4,640,000	kecamatan dan kelurahan
					Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen	18 laporan	3,220,000	18 laporan	3,220,000	
					Penyusunan dan Pengelolaan Dokumen Perencanaan, Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen	6 dokumen	1,420,000	6 dokumen	1,420,000	
4					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase Peningkatan kapasitas SDM aparatur	100%	12,000,000	100%	12,000,000	kecamatan dan kelurahan
					Bimtek Pengelolaan Keuangan Aparatur Kecamatan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	2 Orang	12,000,000	2 Orang	12,000,000	
5	Meningkatkan kemandirian desa	Persentase desa Tertinggal	Meningkatnya kualitas administrasi desa/kelurahan	Persentase peningkatan desa dengan administrasi berkualitas baik	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	63%	4,761,697,589	63%	4,653,810,450	kecamatan dan kelurahan

5	Meningkatkan kemandirian desa	Persentase desa Tertinggal	Meningkatnya kualitas administrasi desa/kelurahan	Persentase peningkatan desa dengan administrasi berkualitas baik	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	63%	4,761,697,589	63%	4,653,810,450	kecamatan dan kelurahan
					Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan	Jumlah Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan yang dilaksanakan	2 kali	4,700,000	2 kali	4,700,000	
					Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah obyek monev	9 desa/kel	31,660,000	9 desa/kel	31,400,000	
					Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Tomas dan Muspika Desa dan Kelurahan	Jumlah obyek monev	9 desa/kel	5,100,000	9 desa/kel	5,100,000	
					Monitoring dan Evaluasi Desa/Kelurahan	Jumlah obyek monev	9 desa/kel	9,000,000	9 desa/kel	9,000,000	
					Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi PKK Desa/ Kelurahan	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi PKK Desa/ Kelurahan yang dilaksanakan	10 keg	7,542,000	10 keg	7,542,000	
					Musrenbang Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang	5 keg	17,205,000	5 keg	8,595,000	
					Pembangunan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah Obyek Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kemasyarakatan Kelurahan yang dibangun	64 obyek	4,145,160,589	64 obyek	4,086,217,000	
					Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	12 kali	9,350,000	12 kali	9,319,450	
					Fasilitasi, Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang melaksanakan pikades	1 desa	55,000,000	1 desa	26,978,000	
					Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup ( Adipura)	Jumlah fasilitas yang dibangun	11 fasilitas	476,980,000	11 fasilitas	464,959,000	

**Tabel 5.2**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**  
**OPD Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (impact)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Lokasi
									2017		
									Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata Indeks kepuasan Aparatur	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan kecamatan	Indeks Kepuasan Aparatur	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kepuasan Aparatur	80%	457,175,470	85%	611,394,000	Kecamatan dan Kelurahan
					Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	27 Jenis	457,175,470	17 Jenis	611,394,000	
2					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarpras Aparatur dengan kondisi layak fungsi	80%	713,635,300	100%	590,930,000	Kecamatan dan Kelurahan
					Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarpras yang berfungsi baik	6 jenis	713,635,300	6 jenis	590,930,000	
3			Mewujudkan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang berkualitas	Score SAKIP OPD	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu	100%	4,640,000	100%	30,354,000	Kecamatan dan Kelurahan
					Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen	14laporan	4,640,000	14 laporan	30,354,000	
4	Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang profesional	Rata-rata IKM	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Kecamatan	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan			70%	9,850,000	Kecamatan dan Kelurahan
					Bintek Peningkatan Pelayanan Prima di kecamatan, kelurahan dan Desa	Jumlah Desa/Kel yang mengikuti Bintek			9 des/kel	5,850,000	
					Fasilitasi Penerbitan layanan Perijinan	Jumlah ijin yang diterbitkan			80 ijin	4,000,000	
5	Meningkatkan kemandirian desa	Persentase desa Tertinggal	Meningkatnya kualitas administrasi desa/kelurahan	Persentase peningkatan desa dengan administrasi berkualitas baik	Program fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persentase desa dengan admisnitrasi desa berkualitas baik	65%	66,337,000	100%	80,072,000	Kecamatan dan Kelurahan

5	Meningkatkan kemandirian desa	Persentase desa Tertinggal	Meningkatnya kualitas administrasi desa/kelurahan	Persentase peningkatan desa dengan administrasi berkualitas baik	Program fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persentase desa dengan admistrasi desa berkualitas baik	65%	66,337,000	100%	80,072,000	Kecamatan dan Kelurahan
					Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah desa/kel yang lunas pajak tepat waktu	9 desa/kel	31,400,000	9 desa/kel	20,700,000	
					Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah Obyek Monitoring dan Evaluasi	9 desa/kel	9,000,000	9 desa/kel	9,000,000	
					Evaluasi Rancangan Peraturan Desa	Jumlah Raperdes yang dievaluasi			4 raperdes	9,000,000	
					Bimtek Pengelolaan keuangan Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kel yang mengikuti bimtek			9 desa/kel	6,102,000	
					Penyelenggaraan Musrenbang Tk Kecamatan dan fasilitasi, Monev Musrenbang desa/Kelurahan	Jumlah desa/kel yang mengikuti musrenbang tk kecamatan	9 desa/kel	13,295,000	9 desa/kel	18,000,000	
					Fasilitasi, monitoring dan evaluasi LPMK, Karangtaruna, PKK, Muspika, Perwosi, Posyandu, Karangwreda Kelurahan	Jumlah lembaga sosial yang di bina	5 lembaga	12,642,000	5 lembaga	7,200,000	
					Fasilitasi, Monitoring dan evaluasi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/klurahan	Jumlah Obyek Monitoring dan Evaluasi			9 desa/kel	2,750,000	
					Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Program-program penanggulangan kemiskinan	Jumlah Obyek Monitoring dan Evaluasi			9 desa/kel	1,620,000	
					Pembinaan nilai budaya, wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat	Jumlah desa/kelurahan yang dibina			9 desa/kel	3,000,000	
					Sosialisasi dan pembinaan katrantibmas dan pecegahan tindak kriminal	Jumlah desa/kelurahan yang dibina			9 desa/kel	2,700,000	

**Tabel 5.3**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**  
**OPD Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (impact)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2016)		Rencana kinerja							
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
									Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata Indeks kepuasan Aparatur	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan kecamatan	Indeks Kepuasan Aparatur	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kepuasan Aparatur	80%	457,175,470	85%	Rp 611,424,509	90%	Rp 611,424,509	95%	Rp 611,424,509	100%	Rp 650,000,833
					Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	27 Jenis	457,175,470	17 jenis layanan	Rp 611,424,509	17 jenis layanan	Rp 611,424,509	17 jenis layanan	Rp 611,424,509	17 jenis layanan	Rp 650,000,833
2					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	80%	713,635,300	85%	Rp 702,050,000	90%	Rp 702,050,000	95%	Rp 702,491,450	100%	Rp 720,000,000
					Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarpras yang berfungsi baik	6 jenis	713,635,300	11 jenis	Rp 702,050,000	11 jenis	Rp 702,050,000	11 jenis	Rp 702,491,450	11 jenis	Rp 720,000,000
3					Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur			36%	Rp 80,000,000	48%	Rp 80,000,000	60%	Rp 82,000,000	81%	Rp 100,000,000
					Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek			15 Orang	Rp 80,000,000	20 Orang	Rp 80,000,000	25 Orang	Rp 82,000,000	34 Orang	Rp 100,000,000
4			Mewujudkan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang	Score SAKIP OPD	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja Kecamatan yang disusun tepat waktu	100%	4,640,000	100%	Rp 47,900,000	100%	Rp 47,900,000	100%	Rp 48,000,000	100%	Rp 52,000,000
					Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen	6 dokumen	3,220,000	6 dokumen	Rp 10,000,000	6 dokumen	Rp 10,000,000	6 dokumen	Rp 10,000,000	6 dokumen	Rp 12,000,000
					Penyusunan Dokumen penganggaran dan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen	8 dokumen	1,420,000	8 dokumen	Rp 9,000,000	8 dokumen	Rp 9,000,000	8 dokumen	Rp 9,000,000	8 dokumen	Rp 10,000,000
					Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah	Jumlah desa/kel yang memiliki profil			9 desa/kel	Rp 28,900,000	9 desa/kel	Rp 28,900,000	9 desa/kel	Rp 29,000,000	9 desa/kel	Rp 30,000,000
5	Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang profesional	Rata-rata IKM	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Kecamatan	Persentase kepuasan masyarakat	70%		75%	Rp 30,550,000	80%	Rp 30,550,000	90%	Rp 31,550,000	100%	Rp 47,550,000

5	Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang profesional	Rata-rata IKM	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Kecamatan	Persentase kepuasan masyarakat	70%		75%	Rp 30,550,000	80%	Rp 30,550,000	90%	Rp 31,550,000	100%	Rp 47,550,000
					Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Obyek Monev			9 desa/kel	Rp 17,550,000	9 desa/kel	Rp 17,550,000	9 desa/kel	Rp 17,550,000	9 desa/kel	Rp 17,550,000
					Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan	Jumlah Ijin yang diterbitkan			100 ijin	Rp 13,000,000	150 ijin	Rp 13,000,000	170 ijin	Rp 14,000,000	200 ijin	Rp 30,000,000
6	Meningkatkan kemandirian desa	Persentase desa Tertinggal	Meningkatnya kualitas administrasi desa/kelurahan	Persentase peningkatan desa dengan administrasi berkualitas baik	Program Fasilitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persentase desa dengan admisnitrasasi desa berkualitas baik	100%	66,337,000	100%	Rp 100,000,000	100%	Rp 100,000,000	100%	Rp 100,000,000	100%	Rp 115,000,000
					Pembinaan Administrasi Desa/Kel	Jumlah desa/kel yang dibina	9 desa/kel	53,042,000	9 desa/kel	Rp 20,000,000	9 desa/kel	Rp 20,000,000	9 desa/kel	Rp 20,000,000	9 desa/kel	Rp 25,000,000
					Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di wilayah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	3 kali	13,295,000	3 kali	Rp 25,000,000	3 kali	Rp 25,000,000	3 kali	Rp 25,000,000	3 kali	Rp 30,000,000
					Pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik di kelurahan	Jumlah sarpras yang terpelihara			5 jenis	Rp 30,000,000	5 jenis	Rp 30,000,000	5 jenis	Rp 30,000,000	5 jenis	Rp 30,000,000
					Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas, Penegakan peraturan Perundangan	Jumlah pembinaan dan monev yang dilaksanakan			6 kali	Rp 15,000,000	6 kali	Rp 15,000,000	6 kali	Rp 15,000,000	6 kali	Rp 15,000,000
					Fasilitasi, Pembinaan dan Monev ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan	Jumlah pembinaan dan monev yang dilaksanakan			6 kali	Rp 10,000,000	6 kali	Rp 10,000,000	6 kali	Rp 10,000,000	6 kali	Rp 15,000,000

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA OPD KECAMATAN WLINGI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN BLITAR**

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Wlingi sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Blitar, maka rencana strategis Kecamatan Wlingi merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Rencana strategis Kecamatan Wlingi akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Blitar 2016 – 2021 yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis tehnologi informasi dan Misi ke-6 yakni Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan kawasan Perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang akan dicapai melalui beberapa tujuan dan sasaran OPD dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah sebagaimana tersusun dalam Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1  
**Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					
			1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan	Indeks Kepuasan Aparatur	Data Dasar	NA	Baik	Baik	Baik	Baik
	Mewujudkan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang berkualitas	Score SAKIP OPD	CC	CC	B	BB	A	A

	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		NA	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Meningkatkan kemandirian desa	Meningkatnya kualitas administrasi desa/kelurahan	Persentase peningkatan desa dengan administrasi berkualitas baik		NA	100%	100%	100%	100%

## BAB VII

### PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Wlingi maka dapat disimpulkan bahwa Fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Wlingi adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama Kecamatan Wlingi agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Wlingi sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Blitar, maka rencana strategis Kecamatan Wlingi merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

Rencana strategis Kecamatan Wlingi akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.

Wlingi, 24 Mei 2017

Pit. CAMAT WLINGI

SUHENDRO WINARSO, S.STP, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19760525 199511 1 001